

SETWAN

2024

LAPORAN TAHUNAN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB



(0370) 625693 - 7507845



www.dprd-ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan (LAPTAH) atau *annual report* merupakan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun, berisikan realisasi yang dicapai pada tiap Program/ Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024. Data dan informasi yang akurat mencakup laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun. Laporan Tahunan juga merupakan bentuk tanggung jawab/akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tahun 2024 merupakan tahun politik yang diwarnai dengan kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dan masih pada tahun yang sama turut serta melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak seluruh Indonesia. Kegiatan politik ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin kegiatan kegiatan Prioritas dan Unggulan dapat tetap dilaksanakan disaat kondisi keuangan berangsur pulih.

Meskipun diwarnai dinamika politik tinggi, sebagai jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Tentunya sasaran dan tujuan dari seluruh tugas yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah untuk kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan strategi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan seluruh Program Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024. Demikian Laporan Tahunan (LAPTAH) ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan di masa mendatang.

Mataram, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ivi
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 LATAR BELAKANG	6
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.4 URAIAN TUGAS.....	9
1.5 DASAR HUKUM.....	14
1.6 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.....	16
1.7 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	17
BAB II	
GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	18
2.1 SEKRETARIAT DPRD	18
2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	18
BAB III	
ISU DAN PERMASALAHAN	30
3.1 ISU DAN PERMASALAHAN	30
BAB IV	
PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	31
4.1 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	31
4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
4.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM.....	32
4.4 RENCANA KERJA SERTA TARGET DAN PENDANAANNYA	33
BAB V.....	
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	45
5.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD	45
5.2 CAPAIAN KINERJA RENSTRA	46
5.3 CAPAIAN KINERJA RENJA OPD.....	47
5.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN	47
5.5 PERMASALAHAN DAN KENDALA	48
5.6 SARAN DAN TINDAK LANJUT	48
BAB VI	
PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM	49
6.1 PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM.....	49

BAB VII

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN.....50

7.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN.....50

BAB VIII

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN51

8.1 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
..... 51

BAB IX

PENUTUP.....52

9.1 PENUTUP52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Tujuan, sasaran dan Strategi dalam Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 17

Tabel 2.1 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Pj. Gubernur) Tahun 2024 20

Tabel 2.2 Interpretasi Hasil Survei 21

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Renstra 22

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 22

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 23

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024 24

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 28

Tabel 3.1 Isu dan Permasalahan 30

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi NTB tahun 2024-2026 32

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB 32

Tabel 4.3 Rencana Kerja, Target dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025 34

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Provinsi NTB 46

Tabel 4.5 Rencana Kerja, Target dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2023 dan Tahun 2024 38

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Provinsi NTB 46

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB 47

Lampiran Laporan 1 55

Lampiran Laporan 2 74

Lampiran Laporan 3 90

Lampiran Laporan 4 100

Lampiran Laporan 5 101

Lampiran Laporan 6 102

Lampiran Laporan 7 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi pondasi bagi Penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap transparansi di semua aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*). Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. *Good Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi NTB harus dapat menyusun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 2 pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi. Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional, sudah selayaknya Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah utamanya bagi Institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekretariat DPRD (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SETWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

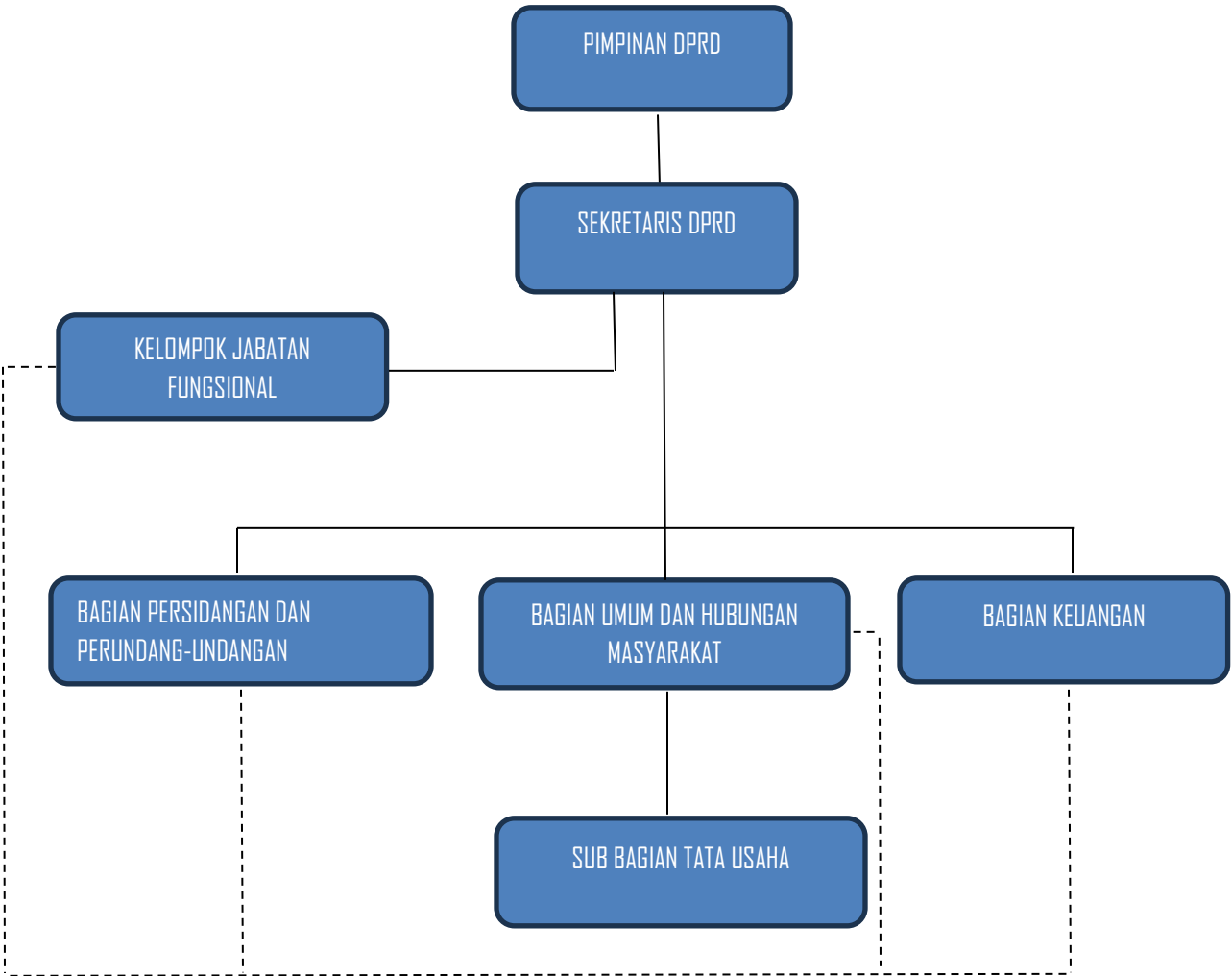
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan
- d. Bagian Keuangan, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2023

1.4 URAIAN TUGAS

Berdasarkan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana merupakan hasil dari perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

I. SEKRETARIS

➤ Rincian Tugas

- a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
- b. Merumuskan bahan kebijakan dan menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- c. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- d. Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;
- g. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
- h. Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ Rincian Fungsi

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelenggaraan persidangan;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;

- c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan suratmenyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;

- g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan, pendistribusian naskah dinas;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
- j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k.
- k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
- n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;
- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor II Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. **Kajian dan Analisis Kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsional Perisalah Legislatif

Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. Fungsional Perencana

Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. Fungsional Hubungan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan website dan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dan kunjungan ke media (*media visit*).

7. Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

1.5 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
9. PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

- 19. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja Perangkat Daerah.
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

1.6 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 merupakan RPD yang bersifat transisi; karena telah berakhirnya RPJMD Tahun 2019-2023. RPD ini menjadi pedoman Pejabat Gubernur dalam menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sejak Tahun 2024 dengan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Pembangunan yang mengacu pada berbagai dokumen perencanaan tersebut serta berbagai isu actual yang dihadapi, maka tujuan akhir Pembangunan Daerah yang ingin dicapai adalah **“Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju Ntb Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa Tenggara Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Dalam hal ini telah teridentifikasi 6 dimensi Pembangunan yang menjadi isu utama yang perlu diatasi dalam pelaksanaan Pembangunan tahun 2024-2026. Fokus perencanaan Pembangunan daerah pada periode 2024-2026 terdiri atas 3 pilar utama dan 3 pilar pendukung. Keenam dimensi tersebut menjadi dasar yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Tiga Pilar Utama meliputi:

- 1. Pilar 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA (*PEOPLE*)
Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal, dan taqwa (kuat).
- 2. Pilar 2 : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (*PLANET*)
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri.
- 3. Pilar 3 : PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN (*PROSPERITY*)
Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri.

Tiga Pilar Pendukung meliputi:

- 1. Pilar Pendukung 1 : DIMENSI TATA KELOLA (GOVERNANCE)
Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.
- 2. Pilar Pendukung 2 : DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)
Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan.
- 3. Pilar Pendukung 3 : DIMENSI DAYA SAING DAERAH (COMPETITIVENESS).
Terwujudnya peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan apa yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu kepada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama tiga tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan

yang tertuang dalam RPD NTB Tahun 2024-2026 yaitu “**Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**”.
sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2024-2026			
Pilar Pendukung No 1: Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi Pembangunan
Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.		Indeks Reformasi Birokrasi	
		Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (Kriteria)	
	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP (Kategori A)	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal Daerah
	2. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	

1.7 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung tujuan pembangunan pemerintah daerah, maka ditetapkan 13 (tiga belas) program strategis dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:

1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktifitas daerah;
2. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan serta derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal, dan Taqwa (KUAT).
4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana.
5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara.
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik).
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan.
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur Kawasan strategis, Kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi.
9. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.
10. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industry dan pengembangan ekspor.
11. Meningkatnya integrasi program Pembangunan daerah dan peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs).
12. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
13. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 SEKRETARIAT DPRD

2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada peluang pasti akan muncul sebuah tantangan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, kebijakan dan program instansi yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD NTB, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 telah memenuhi target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun Rencana Strategis. Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi NTB, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada:

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas. Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (*strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif

dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.

2. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
4. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Ketersediaan Sumber daya Aparatur yang cukup dari segi kuantitas.
6. Terjalannya hubungan baik (harmonis) antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Komitmen DPRD untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah.
8. Adanya Komitmen Pimpinan Sekretariat DPRD untuk mendukung adanya peningkatan kapasitas ASN maupun DPRD.
9. Pemanfaatan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan".
2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Tingginya frekuensi Kerja Insidentil.
4. Beban Kerja Sekretariat DPRD yang tidak merata.
5. Belum Optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
2. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
4. Tingginya Antusiasme dan Aspirasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang diserap melalui kegiatan hearing dan reses.
5. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kegiatan Diklat dan peningkatan kapasitas.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi masih berubah ubah.
2. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat DPRD.
3. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah " Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan". Target dan capaian indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Pj. Gubernur) Tahun 2024

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP Lingkup OPD							Point BB (79)	Point BB (72,05)	91,20
2	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD							100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Capaian kinerja indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam rangka perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sasaran Strategis yang mengukur "Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" pada periode Renstra Setwan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 maka pada periode Renstra Setwan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 telah menjadi Tujuan pada Renstra Setwan Provinsi NTB. Sesuai Cascade Kinerja, Sekretariat DPRD Provinsi Nus Tenggara Barat dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah **"Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik"**.

Terkait hal tersebut **TUJUAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026** adalah:**"Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan"** dengan indikator **"Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD"** menggunakan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan pada akhir tahun 2024, dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang berjumlah 65 orang.

Kuisisioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap 14 unsur pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)
2. Kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD.
3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses.
4. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD.
5. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD.
6. Kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD
7. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD
8. Kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.
9. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana.
10. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD.
11. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.

- 12. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait penyelesain temuan Inspektorat, Irjen dan BPK.
- 13. Ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD.
- 14. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan.

Setiap pernyataan diberikan pilihan jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan pelayanan dimulai dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- 1) Sangat tidak puas , diberi nilai 1;
- 2) Tidak puas, diberi nilai 2;
- 3) Puas, diberi nilai 3;
- 4) Sangat puas, diberi nilai 4.

Interpretasi hasil survei kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD diperoleh berdasarkan rentang kreteria dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Interpretasi Hasil Survei

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KINERJA PELAYANAN
1	2	3
1,00-2,5996	25,00-64,99	Tidak baik
2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang baik
3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik
3,5324-4,00	88,31-100,00	Sangat Baik

A. **CAPAIAN KINERJA TUJUAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB**, Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan dengan indicator Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, berdasarkan hasil survey tahun 2024 masuk kategori B (baik). Adapun hasil survei tersebut berdasarkan perhitungan skor kepuasan. Penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan skor kepuasan 3,20 Skala Likert, apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 80,03 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa **“Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”** termasuk dalam **kategori B (baik)**. Hasil survei penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB tahun 2024 termasuk dalam kategori B (baik), apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis pada tahun 2024 yaitu kategori B (baik), maka capaian target rencana strategis untuk tahun 2024 yaitu 100 persen.

Adapun Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 ada dua (2) yaitu:

- 1. **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**, dengan Indikator **Nilai Sakip Lingkup OPD**.
- 2. **“Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**, dengan Indikator **Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**.

B. **SASARAN STRATEGIS I SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain:

- (a) penilaian kualitas **perencanaan kinerja** yang memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- (b) penilaian **pengukuran kinerja** berjenjang dan berkelanjutan yang menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja;
- (c) penilaian **pelaporan kinerja** yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- (d) penilaian **evaluasi akuntabilitas kinerja internal** yang memberikan hasil nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- (e) pencapaian **Sasaran/kinerja Organisasi** (tindak lanjut dan komitmen).

C. SASARAN STRATEGIS 2 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026:

Adapun **TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB PADA TAHUN 2024** dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Target Kinerja Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK		REALISASI PK		CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup DPD	91,20%	Point BB (79)	Point A (82)	Point BB 72,05	-	-	Point A (85)
Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	-	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROYEKSI 2025 *	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TUJUAN: Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Lingkup DPD	Nilai/Point	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB (73,09)	Nilai BB (72,05)	Nilai BB	
	SASARAN 2: Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1		Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas dan Disetujui	Perda	16	16	12	12	12	14	11	16	8	12	12	
2		Kegiatan Hearing/Dialog Pimpinan Dan Anggota DPRD Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Yang Difasilitasi	Kali/Orang	480	120	48	480	480	540	60	1.077	925	895	480	
3		Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Difasilitasi	Kali	252	480	480	480	225	268	540	192	207	193	480	
4		Rapat Paripurna Yang Difasilitasi	Kali	48	252	48	48	46	46	268	40	42	39	46	
5		Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROYEKSI 2025 *	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali/Orang	28	2860	2860	2860	1950	28	2898	4918	3182	5.395	2860	
7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Bintek/Workshop) Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	3	65	65	65	65	3	65	65	65	130	65	
8		Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Keg/Kali	32	32	36	36	36	39	53	53	68	34	36	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

INDIKATOR	URAIAN FASILITASI KEGIATAN DAN PELAYANAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
Cakupan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Sumber Data: Data Internal Sekretariat DPRD NTB	1. Fasilitas kegiatan hearing	895	Kali/orang
	2. Fasilitas kunjungan kerja DPRD Povinsi NTB	5.395	Kali/orang
	3. Fasilitas kegiatan rapat paripurna	39	Kali
	4. Fasilitas kegiatan rapat alat kelengkapan dewan (AKD)	193	Kali
	5. Fasilitas kegiatan rancangan perda yang telah dibahas dan disahkan	12	Buah
	6. Fasilitas kegiatan Reses DPRD Provinsi NTB	2	Kali
	7. Fasilitas kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi NTB	130	Kali/orang
	8. Fasilitas publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	34	Keg/kali
	Jumlah jenis pelaksanaan tugas pokok DPRD Provinsi NTB yang difasilitasi	8	Jenis
	Cakupan Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB	100	Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dituangkan dalam 2 (dua) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub Kegiatan. Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar 92,69%, dan realisasi fisik 96,40%. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 130.077.038.339,- yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD, sampai dengan Bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 120.568.582.054,- (92,69%). Realisasi dari Belanja Keuangan yang kurang dari seratus persen yaitu sebesar 92,69% dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi, yang mana pada Tahun 2024 adalah tahun pergantian Pimpinan dan Anggota DPRD hasil Pemilihan Legislatif. Proses pemilihan Pimpinan definitif dan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan kunjungan kerja maupun rapat-rapat kerja.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2024-2026. Realisasi Belanja Keuangan mencapai 92,69%, ini diakibatkan oleh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat memenuhi target. Terdapat 4 Kegiatan yang dilaksanakan, yang realisasi anggarannya dibawah 65%, yang merupakan faktor penyebab tidak terealisasinya pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 62,19% dari target 100%, pada kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD hanya tercapai 61,62% dari target 100%, pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang hanya tercapai 45,21% dari target 100% dan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang hanya tercapai 32,37% dari target 100%, selain karena adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD NTB serta dinamika pembahasan anggaran yang terjadi antara TAPD dan Lembaga Legislatif juga

mewarnai kegiatan tahun 2024. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang pembentukannya membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang setelah ditetapkan anggotanya DPRD Provinsi NTB Periode 2024-2029.

Adapun Capaian masing-masing Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah:

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		130.077.038.339	120.568.582.054	92,69	96,40	9.508.456.285
DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	Nilai SAKIP Lingkup DPD (nilai/point)	74.219.854.919	70.568.136.612	95,08	98,80	3.651.718.307
	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persentase)	55.857.183.420	50.000.445.442	89,51	94,00	5.856.737.978
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup DPD	74.219.854.919	70.568.136.612	95,08	98,80	3.651.718.307
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	576.441.700	430.922.620	74,76	100,00	145.519.080
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.337.900	129.618.720	69,56	100,00	56.719.180
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.834.100	50.607.300	60,37	100,00	33.226.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	93.733.600	78.726.500	83,99	100,00	15.007.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13.048.300	11.433.600	87,63	100,00	1.614.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30.184.000	20.901.000	69,25	100,00	9.283.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.292.400	32.554.500	80,80	100,00	7.737.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.011.400	107.081.000	83,00	100,00	21.930.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.930.918.043	13.745.761.912	92,06	100,00	1.185.156.131
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.359.262.193	13.197.023.742	91,91	100,00	1.162.238.451
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.083.600	297.732.920	94,19	100,00	18.350.680
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	223.923.250	221.629.850	98,98	100,00	2.293.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.173.600	27.900.000	92,46	100,00	2.273.600
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.475.400	1.475.400	100,00	100,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	37.962.000	23.610.000	62,19	95,00	14.352.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.531.000	-	-	-	3.531.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.521.000	2.880.000	63,70	100,00	1.641.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.910.000	20.730.000	69,31	100,00	9.180.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1.460.323.700	1.308.665.100	89,61	93,00	151.658.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	470.250.000	410.255.000	87,24	100,00	59.995.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	750.604.500	750.501.500	99,99	100,00	103.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.959.200	36.908.600	92,37	100,00	3.050.600
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.000.000	-	-	-	22.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	177.510.000	111.000.000	62,53	100,00	66.510.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.764.775.050	5.253.371.610	91,13	100,00	511.403.440
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72.680.000	72.680.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	629.229.650	581.734.650	92,45	100,00	47.495.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	267.240.300	243.419.115	91,09	100,00	23.821.185
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	102.788.000	99.530.000	96,83	100,00	3.258.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170.680.000	165.950.000	97,23	100,00	4.730.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.631.100.000	2.394.864.445	91,02	100,00	236.235.555
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.791.595.000	1.616.900.000	90,25	100,00	174.695.000
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.796.100	24.744.400	99,79	100,00	51.700
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.666.000	53.549.000	71,72	100,00	21.117.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	537.529.660	473.050.000	88,00	100,00	64.479.660
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355.264.660	332.950.000	93,72	100,00	22.314.660
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	182.265.000	140.100.000	76,87	100,00	42.165.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.252.769.520	5.837.591.273	93,36	100,00	415.178.247
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.849.000	50.194.000	63,66	100,00	28.655.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	964.000.000	800.260.353	83,01	100,00	163.739.647

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.209.920.520	4.987.136.920	95,72	100,00	222.783.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2.058.082.000	1.865.334.243	90,63	100,00	192.747.757
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	167.600.000	121.024.999	72,21	100,00	46.575.001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	730.470.000	666.007.534	91,18	100,00	64.462.466
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.500.000	9.250.000	52,86	100,00	8.250.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	355.446.000	310.892.750	87,47	100,00	44.553.250
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35.000.000	7.404.460	21,16	100,00	27.595.540
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	752.066.000	750.754.500	99,83	100,00	1.311.500
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	41.721.238.426	40.939.513.729	98,13	100,00	781.724.697
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	41.113.488.426	40.333.713.729	98,10	100,00	779.774.697
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	607.750.000	605.800.000	99,68	100,00	1.950.000
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	879.814.820	690.316.125	78,46	100,00	189.498.695
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	311.184.220	188.975.020	60,73	100,00	122.209.200
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	148.630.600	135.552.600	91,20	100,00	13.078.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	420.000.000	365.788.505	87,09	100,00	54.211.495
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	55.857.183.420	50.000.445.442	89,51	94,00	5.856.737.978
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	1.541.334.500	949.778.700	61,62	95,00	591.555.800
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	293.218.500	132.729.700	45,27	100,00	160.488.800
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1.213.336.000	817.049.000	67,34	100,00	396.287.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	34.780.000	-	-	-	34.780.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	654.466.200	436.334.500	66,67	100,00	218.131.700
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	92.966.200	68.745.500	73,95	100,00	24.220.700
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.609.000	57.048.000	61,60	100,00	35.561.000
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	142.801.000	78.613.000	55,05	100,00	64.188.000
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	203.509.000	118.833.000	58,39	100,00	84.676.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	122.581.000	113.095.000	92,26	100,00	9.486.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	608.583.570	196.990.520	32,37	100,00	411.593.050
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	125.118.500	30.509.450	24,38	100,00	94.609.050
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	118.123.170	49.089.570	41,56	100,00	69.033.600
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	130.477.330	40.547.630	31,08	100,00	89.929.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	118.123.170	42.330.170	35,84	100,00	75.793.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	116.741.400	34.513.700	29,56	100,00	82.227.700
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	4.690.744.800	4.037.838.168	86,08	98,00	652.906.632
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	1.097.931.600	1.095.881.420	99,81	100,00	2.050.180
Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	987.799.500	978.962.798	99,11	100,00	8.836.702
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	789.400.000	423.300.000	53,62	100,00	366.100.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	454.760.200	439.111.700	96,56	100,00	15.648.500
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500.000	17.450.000	68,43	100,00	8.050.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14.298.500	-	-	-	14.298.500
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.321.055.000	1.083.132.250	81,99	100,00	237.922.750
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	26.640.116.150	25.005.044.586	93,86	100,00	1.635.071.564
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8.753.600.000	7.397.851.048	84,51	100,00	1.355.748.952
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	64.555.000	43.715.000	67,72	100,00	20.840.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17.821.961.150	17.563.478.538	98,55	100,00	258.482.612
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	68.953.800	31.176.200	45,21	100,00	37.777.600
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	39.861.400	22.450.000	56,32	100,00	17.411.400
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	29.092.400	8.726.200	29,99	100,00	20.366.200
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	21.652.984.400	19.343.282.768	89,33	100,00	2.309.701.632
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.654.400.000	18.601.896.568	90,06	100,00	2.052.503.432
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	78.556.500	63.231.500	80,49	100,00	15.325.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	920.027.900	678.154.700	73,71	100,00	241.873.200

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Evaluasi kinerja di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bagian, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran Tahun 2024.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2026	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik			
	Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai 88 (79)	Nilai 88 (72,05)*	Nilai A			
	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%			
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang Diinisiasi DPRD	100%	100%	100%			
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	100%*	100%			
		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	12 Perda	12 Perda	12 Perda			
		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	480 orang	895 orang*	480 Orang			
		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	225 kali	193 kali*	480 Kali			
		Rapat paripurna yang difasilitasi	jumlah rapat paripurna	46 kali	39 kali	46 Kali			
		Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	2 kali	2 kali	3 Kali			
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	1950 SPPD	5.395 SPPD	2860 SPPD			
		Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/ pelatihan lainnya	65 orang	130 orang	65 Orang			
		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	36 kali	34 kali	36 Kali			

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Pada tahun 2024, sebagai bagian dari Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Dari target 9 Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, sampai dengan bulan Desember 2024 telah ditetapkan 12 Perda, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda).
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044.
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB III
ISU DAN PERMASALAHAN

3.1 ISU DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 yang merupakan hasil dari beberapa kali perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dengan menyelenggarakan empat fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Unsur tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Beberapa permasalahan utama yang menghambat dalam pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.1 Isu dan Permasalahan

NO.	PERMASALAHAN	ISU
1	2	3
1	Ketersediaan sumber daya aparatur yang cukup namun tidak disertai dengan tingkat pendidikan yang memadai.	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan dan Kinerja Lembaga Legislatif
2	Ketersediaan sumber daya aparatur yang masih terbatas dari segi kualitas.	
3	Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.	
4	Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB kadangkala harus bersinggungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.	
5	Struktur Organisasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya	
6	Belum optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan.	
7	Penataan lingkungan kantor, ruang rapat, halaman, pagar Sekretariat DPRD dan pengadaan fasilitas lainnya yang perlu ditingkatkan untuk kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor.	
8	Masih banyak mebel, kendaraan, dan peralatan lainnya yang perlu diperbaharui untuk mendukung kelancaran kegiatan anggota DPRD Provinsi NTB	
9	Belum tersedianya area merokok, jalur khusus disabilitas, ruang menyusui, tempat penitipan anak, press room, ruang medis dan ambulance	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

BAB IV
PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

4.1 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mendukung pelaksanaan Visi NTB Emas 2045 dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045. Tujuan Akhir dari RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah : ***" Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju Ntb Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Dan Nusa Tenggara Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"***.

Dalam rangka mewujudkan Ultimate Gold Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang Kuat, NTB yang Lestari dan Asri, NTB yang semakin mandiri, Meningkatnya Tata Kelola Daerah melalui Reformasi Birokrasi, serta Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's dan Peningkatan Daya Saing, ditetapkan 3 (tiga) Pilar Utama dan 3 (tiga) Pilar Pendukung RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Pilar Utama 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA (*PEOPLE*)
 Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal, dan taqwa (kuat).

- 2. Pilar Utama 2 : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (*PLANET*)
 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri.

- 3. Pilar Utama 3 : PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN (*PROSPERITY*)
 Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri.

- 4. Pilar Pendukung 1 : DIMENSI TATA KELOLA (*GOVERNANCE*)
 Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

- 5. Pilar Pendukung 2 : DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SDG's*)
 Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan.

- 6. Pilar Pendukung 3 : DIMENSI DAYA SAING DAERAH (*COMPETITIVENESS*).
 Terwujudnya peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan apa yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu kepada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama tiga tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tertuang dalam RPD NTB Tahun 2024-2026 yaitu ***"Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah"***. sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi NTB tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi Pembangunan	Indikator	Target			Kinerja Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan ke-5: Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal Daerah	Nilai SAKIP	A	A	A	A

Sumber: Dokumen RPD Provinsi NTB Hal. 483, 2024

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun politik yang diwarnai dengan kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif dan masih pada tahun yang sama turut serta melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak seluruh Indonesia. Meskipun diwarnai dinamika politik tinggi, sebagai jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Mengacu pada Pilar Utama dan Pilar Pendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terutama pada **Tujuan ke-5 RPD, “Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”** dengan **Sasaran ke-8 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik ”**, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan tujuan, sasaran dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Layanan Keskretariatian DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	Point BB (75)	Point A (82)	Point A (85)
		Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 persen	100 persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

4.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014) pada pasal 1 (satu) bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Pada pasal 18 dan pasal 298 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan Belanja Daerah

diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Adapun Jenis Standar Pelayanan minimal sesudah UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standart pelayanan. Standart Pelayanan ditetapkan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sehingga perlu ditetapkan standart pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh jenis pelayanan tidak terkecuali pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Standart Pelayanan dan SOP pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Pengajuan Raperda usul Prakarsa DPRD Provinsi NTB
2. Pelayanan Rapat Badan-Badan, Komisi-Komisi dan Fraksi.
3. Pelayanan Fasilitas Rapat-Rapat Bapemperda dan Pansus
4. Pelayanan Fasilitas Rancangan Produk Hukum
5. Pelayanan Fasilitas Program Perencanaan Pembentukan Perda
6. Pelayanan Fasilitas Raperda Usul Inisiatif DPRD
7. Pelayanan Pelaksanaan Sosialisasi Perda Anggota DPRD
8. Pelayanan Pendokumentasian Produk-Produk dan Kegiatan DPRD
9. Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka
10. Pelayanan Pengadaan dan Pengelolaan Kepustakaan
11. Pelayanan Pengembalian Bahan pustaka
12. Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja
13. Pelayanan Fasilitas Rapat Paripurna
14. Pelayanan Fasilitas Penyampaian Aspirasi masyarakat
15. Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pelayanan Pemrosesan Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi NTB
17. Pelayanan Pemrosesan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi NTB
18. Pelayanan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi NTB
19. Pelayanan Proses Penerimaan Surat Masuk
20. Pelayanan Pemrosesan Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

4.4 RENCANA KERJA SERTA TARGET DAN PENDANAANNYA

Pelaksanaan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja Tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perencanaan Anggaran. Berikut Rencana Kerja serta Target dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Tabel 4.3 Rencana Kerja, Target dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Prov NTB	Point BB (79)	74,219,854,919	APBD	Point A (82)	75.117.784.644	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Prov NTB	22 Dokumen	576,441,700	APBD	22 Dokumen	625.318.035	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov NTB	1 Dokumen	186,337,900	APBD	1 Dokumen	196.351.200	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	83,834,100	APBD	1 Dokumen	82.371.400	
4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	93,733,600	APBD	1 Dokumen	118.314.400	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	13,048,300	APBD	1 Dokumen	15.812.643	
4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	30,184,000	APBD	1 Dokumen	36.643.640	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan LKJIP, LKPJ-LPPD dan RKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov NTB	1 Laporan	40,292,400	APBD	1 Laporan	51.293.352	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan bulanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov NTB	16 Laporan	129,011,400	APBD	16 Laporan	124.531.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov NTB	100 Persen	14,930,918,043	APBD	100 Persen	14.930.918.043	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov NTB	123 Org/ Bulan	14,359,262,193	APBD	123 Org/ Bulan	14.359.262.193	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat SPT/ SPPD serta SPJ bagi ASN yang melaksanakan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov NTB	1 Dokumen	316,083,600	APBD	1 Dokumen	316.083.600	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melakukan Verifikasi dokumen SPJ Belanja pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov NTB	7500 Dokumen	223,923,250	APBD	7500 Dokumen	223.923.250	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov NTB	1 Laporan	30,173,600	APBD	1 Laporan	30.173.600	
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan Bahan Pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Prov NTB	1 Dokumen	1,475,400	APBD	1 Dokumen	1.475.400	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Prov NTB	100 Persen	37,962,000	APBD	100 Persen	42.462.000	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov NTB	2 Dokumen	3,531,000	APBD	2 Dokumen	3.531.000	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov NTB	Dokumen			Laporan	9.021.000	
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Menyusun Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov NTB	2 Laporan	4,521,000	APBD	2 Laporan	9.021.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov NTB	1 Laporan	29,910,000	APBD	1 Laporan	29.910.000	
4.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Menyusun Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov NTB	Dokumen			Dokumen	-	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	Prov NTB	1 Dokumen	1,460,323,700	APBD	1 Dokumen	1.528.497.700	
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Menyiapkan Daftar Hadir dan Absensi Elektronik	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov NTB	2 Unit	470,250,000	APBD	2 Unit	478.201.000	
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyiapkan Atribut Pakaian Dinas seperti Papan Nama, Lencana Korpi serta Tanda Pengenal Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov NTB	1 Paket	750,604,500	APBD	1 Paket	750.604.500	
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Membuat Buku Penjagaan Terkait dengan SKP, Model DK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov NTB	1 Dokumen	39,959,200	APBD	1 Dokumen	89.782.200	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov NTB	4 Orang	22,000,000	APBD	4 Orang	32.400.000	
4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov NTB	Org	-		Org	-	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov NTB	20 Org	177,510,000	APBD	20 Org	177.510.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Prov NTB	100 Persen	5,764,775,050	APBD	100 Persen	6.424.525.330	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Istalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Prov NTB	1 Paket	72,680,000	APBD	1 Paket	72.680.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov NTB	Paket			1 Paket	-	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga Ketua DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov NTB	1 Paket	629.229.650	APBD	Paket	629.229.650	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meyediakan ATK, Makan Minum Rapat dan Bahan cetak Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov NTB	1 Paket	267.240.300	APBD	1 Paket	267.240.300	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov NTB	1 Paket	102.788.000	APBD	1 Paket	124.373.480	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan seperti koran, peraturan undang-undang dan bulletin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov NTB	7 Dokumen	170.680.000	APBD	7 Dokumen	210.515.800	
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Menyediakan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Prov NTB	Paket			Paket	-	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melakukan fasilitasi tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov NTB	1 Laporan	2.631.100.000	APBD	1 Laporan	2.840.000.000	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov NTB	1 Laporan	1.791.595.000	APBD	1 Laporan	2.181.000.000	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melakukan penataan arsip SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	24.796.100	APBD	1 Dokumen	24.796.100	
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melakukan Suport terhadap pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov NTB	1 Dokumen	74.666.000	APBD	1 Dokumen	74.690.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Prov NTB	2 Unit	537,529,660	APBD	4 Unit	537.529.660	
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		4 Unit	-	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		1 Unit	-	
4.02.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Melakukan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Sepeda motor listrik)	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		- Unit	-	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Melakukan Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor dan Meja Kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov NTB	2 Paket	355,264,660	APBD	2 Paket	355.264.660	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pengadaan Komputer, Printer,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov NTB	12 Unit	182,265,000	APBD	12 Unit	182.265.000	
4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Melakukan Pengadaan home use	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		Unit	-	
4.02.01.1.07.0010	Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		Unit	-	
4.02.01.1.07.0011	Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prov NTB	Unit	0		Unit	-	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prov.NTB	100 Persen	6,252,769,520	APBD	100 Persen	6.252.769.520	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melakukan Pengadministrasian Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov.NTB	1 Laporan	78,849,000	APBD	1 Laporan	78.849.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov.NTB	1 Laporan	964.000.000	APBD	1 Laporan	964.000.000	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan jasa pelayanan kantor berupa Tenaga Administrasi, Tenaga keamanan dan Tenaga Kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov.NTB	1 Laporan	5.209.920.520	APBD	1 Laporan	5.209.920.520	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Prov.NTB	90 Unit	2.058.082.000	APBD	6 Unit	2.141.882.000	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov.NTB	4 Unit	167.600.000	APBD	4 Unit	251.400.000	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prov.NTB	66 Unit	730.470.000	APBD	66 Unit	730.470.000	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Melakukan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Prov.NTB	6 Unit	17.500.000	APBD	6 Unit	17.500.000	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan pemeliharaan laptop, pc, printer	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov.NTB	10 Unit	355.446.000	APBD	10 Unit	355.446.000	
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Melakukan pemeliharaan aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Prov.NTB	1 Unit	35.000.000	APBD	1 Unit	35.000.000	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Taman Sekretariat dan Gedung DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov.NTB	3 Unit	752.066.000	APBD	3 Unit	752.066.000	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melakukan pemeliharaan gedung kantor Sekretariat dan Gedung DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Prov.NTB	Unit	0		Unit	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.01.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	Prov.NTB	2 Jenis Layanan	41,721,238,426	APBD	3 Jenis Layanan	41.721.238.426	
4.02.01.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Prov.NTB	65 Org/ Bulan	41,113,488,426	APBD	65 Org/ Bulan	41.113.488.426	
4.02.01.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Menyediakan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Prov.NTB	2 Paket	607,750,000	APBD	2 Paket	607.750.000	
4.02.01.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Melaksanakan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Prov.NTB	Orang	0		65 Orang	-	
4.02.01.16	Layanan Adminstrasi DPRD		Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	Prov.NTB	3 Jenis Layanan	879,814,820	APBD	4 Jenis Layanan	912.643.930	
4.02.01.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Menyusun Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Prov.NTB	Dokumen	0		1 Dokumen	-	
4.02.01.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Memfasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Prov.NTB	1 Laporan	311,184,220	APBD	1 Laporan	338.265.530	
4.02.01.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prov.NTB	1 Laporan	148,630,600	APBD	1 Laporan	154.378.400	
4.02.01.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Prov.NTB	3 Paket	420,000,000	APBD	3 Paket	420.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Prov.NTB	100 Persen	55,857,183,420	APBD	100 Persen	67.991.356.391	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Prov.NTB	9 Perda dan Peraturan DPRD	1,541,334,500	APBD	9 Perda dan Peraturan DPRD	1.541.334.500	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun program pembentukan perda (propemperda)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prov.NTB	Dokumen	-		6 Dokumen	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(II)
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Membahas Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Prov.NTB	12 Dokumen	293.218.500	APBD	12 Dokumen	293.218.500	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi perda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Prov.NTB	1 Dokumen	1.213.336.000	APBD	1 Dokumen	1.213.336.000	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Prov.NTB	Dokumen	0		1 Dokumen	-	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Menyusun dokumen tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Prov.NTB	1 Dokumen	34.780.000	APBD	1 Dokumen	34.780.000	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Prov.NTB	Orang	0		100 Orang	-	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Prov.NTB	5 Laporan	654.466.200	APBD	5 Laporan	723.901.310	
4.02.01.1.02.0002	Pembahasan KUA dan PPAS	Memfasilitasi rapat pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Prov.NTB	1 Dokumen	92.966.200	APBD	1 Dokumen	92.966.200	
4.02.01.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov.NTB	1 Dokumen	92.609.000	APBD	1 Dokumen	92.609.000	
4.02.01.1.02.0003	Pembahasan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Prov.NTB	1 Dokumen	142.801.000	APBD	1 Dokumen	142.801.000	
4.02.01.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Prov.NTB	1 Dokumen	203.509.000	APBD	1 Dokumen	203.509.000	
4.02.01.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Prov.NTB	Dokumen			Dokumen	-	
4.02.01.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prov.NTB	1 Dokumen	122.581.000	APBD	1 Dokumen	192.016.110	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prov.NTB	5 Laporan	608,583,570	APBD	7 Laporan	635.015.250	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prov.NTB	1 Laporan	125,118,500	APBD	1 Laporan	139.964.800	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prov.NTB	1 Laporan	118,123,170	APBD	1 Laporan	107.250.740	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prov. NTB	1 Laporan	130,477,330	APBD	1 Laporan	130.477.330	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prov. NTB	1 Laporan	118,123,170	APBD	1 Laporan	129.207.030	
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prov. NTB	1 Laporan	116,741,400	APBD	1 Laporan	128.115.350	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Memfasilitasi rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prov. NTB	Dokumen	0		Dokumen	-	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Memfasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prov. NTB	Dokumen	0		1 Dokumen	-	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Memfasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	Prov. NTB	Dokumen	-		1 Dokumen	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(I)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(II)
			Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Prov.NTB	65 Orang	4,690,744,800	APBD	65 Orang	4.955.971.900	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	1,097,931,600	APBD	1 Dokumen	1.172.931.600	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Workshop/Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Prov.NTB	65 Dokumen	987,799,500	APBD	65 Dokumen	987.799.500	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menyediakan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Prov.NTB	100 Orang	789,400,000	APBD	100 Orang	789.400.000	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Menyediakan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Prov.NTB	8 Orang	454,760,200	APBD	9 Orang	455.702.400	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Kegiatan Hearing DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Prov.NTB	1 Dokumen	25,500,000	APBD	1 Dokumen	108.660.000	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Menyusun Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	14,298,500	APBD	1 Dokumen	59.977.900	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Menyusun Laporan/Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	1,321,055,000	APBD	1 Dokumen	1.381.500.500	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Prov.NTB	3 Laporan	26,640,116,150	APBD	3 Laporan	36.831.461.031	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Prov.NTB	1 Laporan	8,753,600,000	APBD	1 Laporan	11.202.200.000	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Menyusun Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Prov.NTB	2 Dokumen	64,555,000	APBD	2 Dokumen	64.555.000	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Memfasilitasi pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Prov.NTB	2 Dokumen	17,821,961,150	APBD	3 Dokumen	25.564.706.031	
4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Prov.NTB	Orang	-		200 Orang	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Prov.NTB	2 Laporan	68,953,800	APBD	2 Laporan	77.089.000	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	39,861,400	APBD	1 Dokumen	42.216.000	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Prov.NTB	1 Laporan	29,092,400	APBD	1 Laporan	34.873.000	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	Prov.NTB	3 Jenis Fasilitasi	21,652,984,400	APBD	5 Jenis Fasilitasi	23.226.583.400	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	20,654,400,000	APBD	1 Dokumen	22.079.400.000	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Menyusun laporan kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Prov.NTB	Laporan	0		1 Laporan	10.675.000	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Memfasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Prov.NTB	1 Dokumen	78,556,500	APBD	1 Dokumen	97.506.500	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Memfasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan serta Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Prov.NTB	1 Dokumen	920,027,900	APBD	1 Dokumen	1.039.001.900	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Prov.NTB	Dokumen	0		1 Dokumen	-	
TOTAL						130,077,038,339			143,109,141,035	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

BAB V

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

5.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah pada masa transisi Kepala Daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Capaian Indikator RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Provinsi NTB

No	NAMA PERANGKAT DAERAH/URUSAN PEMERINTAHAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL		2024			2025			2026			KONDISI AKHIR RPD		
			2022	2023	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% TINGKAT CAPAIAN
	SEKRETARIAT DPRD															
1	NILAI SAKIP	KATEGORI	BB (73,20)	BB (73,20)	A	BB (73,20)	-	A	-	-	A	-	-	A (85)	NA	NA

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024, Data 2022

5.2 CAPAIAN KINERJA RENSTRA

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Lingkup Temporal 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah Merupakan penjabaran dari RPD yang disusun oleh setiap Kepala Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Kepala Bappeda Provinsi NTB. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Berikut hasil Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Periode Pelaksanaan Tahun 2024-2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Serta Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Periode Pelaksanaan Tahun 2024-2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 (terlampir pada Laporan I).

5.3 CAPAIAN KINERJA RENJA OPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan Indikator kinerja antara lain adalah:

- i. Indikator kinerja harus spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi;
- ii. Indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- iii. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan;
- iv. Indikator kinerja harus dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak;
- v. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- vi. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai.

Pada sektor publik seperti pemerintahan, menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pada sektor pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Adapun Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD pada 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

No	Indikator	Target Tahun			Realisasi Tahun			Capaian Tahun			Formulasi Pengukuran
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Point BB (79)	Point A (82)	Point A (85)	Point BB (72.05)			91.20%			Aspek Penilaian SAKIP : A. Perencanaan Kinerja (30%) B. Pengukuran Kinerja (25%) C. Pelaporan Kinerja (15%) D. Evaluasi Internal (10%) E. Pencapaian Sasaran/ /Kinerja Organisasi (20%)
2	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%			100%			Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Pelaksanaan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi setiap tahunnya. Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sebagaimana yang terlihat pada lampiran laporan 2, Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi NTB Periode Pelaksanaan Tahun 2024.

5.4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026. Program Strategis dan Program Unggulan Daerah Provinsi NTB merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai wujud dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA Provinsi NTB, untuk

mengatasi permasalahan ditengah masyarakat. Untuk melaksanakan program unggulan tersebut Sekretariat DPRD harus dapat menyusun rencana program, kegiatan, subkegiatan dan atau pekerjaan utama yang mendukung kinerja DPRD dalam rangka bersinergi dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah. Sebagaimana terlihat pada lampiran laporan 3.

5.5 PERMASALAHAN DAN KENDALA

1. Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling penting. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024, dengan tingkat pendidikan Diploma ke Atas mencapai + 56,30% dan tingkat Pendidikan SMA ke bawah mencapai 43,70%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi, hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi Sumber daya Manusia Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
2. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.
4. Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan *supporting system* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Lembaga legislative yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Provinsi NTB. Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat memanfaatkan dukungan DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi NTB meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB, tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan DPRD Provinsi NTB.
5. Struktur Organisasi Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
6. Aspek lainnya adalah Belum optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.
7. Masih perlu penataan lingkungan kantor dan ruangan, khususnya penataan ruang rapat, halaman, pagar Sekretariat DPRD dan pengadaan fasilitas eskalator untuk mempermudah mobilitas vertikal di gedung bertingkat, hal ini juga sangat terkait dengan kenyamanan, kemudahan kerja dan keamanan lingkungan kantor.
8. Banyak sarana kerja yang sudah saatnya diperbaharui, seperti mebeulair, kendaraan dinas/operasional, sound system dan voice recorder.
9. Belum tersedianya area merokok, jalur khusus disabilitas, ruang menyusui, tempat penitipan anak, press room, ruang medis dan ambulance.

5.6 SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. Adanya komitmen untuk peningkatan kompetensi kepada pegawai ASN dan Non ASN sebagai bentuk pengembangan kompetensi diri.
2. Merekrut pegawai yang berkompeten sesuai bidangnya masing-masing dan ditugaskan pada bidang yang sesuai.

BAB VI

PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM

6.1 PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMUM

Amanah penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014) pada pasal 1 (satu) bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara kemudian dipertegas pada pasal 18 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 130 ayat (1) DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja. pelayanan daerah, kemudian pada Pasal 144 ayat (1) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Jenis Standart Pelayanan Minimal sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial. (dapat dilihat pada lampiran laporan 6).

BAB VII

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN

7.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN YANG DIARAHKAN

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Konteks Publik, dana perimbangan merupakan Solusi untuk menutup celah fiskal atau *Fiscal Gap* antara belanja daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut. Dana Perimbangan merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang Program Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Dana Alokasi Khusus pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB, tidak ada atau nihil. (Terlampir dalam laporan 4).

BAB VIII

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

8.1 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan dan tugas pembantuan yang kegiatannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi NTB, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi. Adapun Pelaksanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB tidak bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana terlampir pada Laporan 7.

BAB IX

PENUTUP

9.1 PENUTUP

Sekretariat DPRD NTB Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD NTB, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Instansi yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 telah memenuhi target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun Rencana Strategis.. Hasil penilaian unsur pelayanan kepada DPRD menunjukkan bahwa beberapa unsur menunjukkan nilai yang baik, yaitu unsur Kualitas, ketepatan, kecepatan kelengkapan, kebersihan dan kenyamanan dalam memfasilitasi dan menyiapkan dukungan kegiatan pembahasan Rancangan Perda, Kegiatan Hearing, Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna, Bimtek/Workshop Anggota DPRD dan Publikasi Kegiatan. Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD dan unsur Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD. Ada beberapa sub kegiatan hasil capaian target pelaksanaannya tidak terpenuhi. Untuk permasalahan tersebut Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian sebagai bahan perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun berikutnya

Beberapa unsur pelayanan kepada DPRD perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian Sekretariat DPRD agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD pada tahun-tahun selanjutnya. Beberapa unsur yang perlu ditingkatkan yaitu: Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD, Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana, dan unsur Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir).

Bentuk rencana tindak lanjut untuk pencapaian target kinerja, hal-hal yang akan dilakukan Sekretariat DPRD pada masa yang akan datang yaitu :

1. Penataan kembali Struktur Organisasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
2. Perbaikan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-undangan.
4. Pengelolaan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.

Demikian Laporan Tahunan Anggaran 2024 ini disusun, dengan harapan tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik serta target pencapaian bersinergi dengan kebutuhan Ke-Sekretariatan dan DPRD Provinsi NTB.

Mataram, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan 1, Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.
2. Laporan 2, Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.
3. Laporan 3, Progress Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pekerjaan Utama Tahun 2024 yang mendukung Program Prioritas dan Program Unggulan Provinsi NTB.
4. Laporan 4, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.
5. Laporan 5, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024.
6. Laporan 6, Laporan Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024.
7. Laporan 7, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.

Lampiran Laporan 1

Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Pelaksanaan Tahun 2024-2026
Indikator dan Target kinerja Perangkat daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RPD Provinsi NTB
Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026
(sesuai Permendagri 77/2020)

No	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP (kategori)	A	A	A

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Baik	120,649,100,319	Baik	125,243,234,593	Point A (85)	369,905,309,815	Point 88 (79)	128,068,436,605	Point A (82)	118,368,436,605	Point A (85)	123,468,436,605	Point 88 (72,05)	120,568,582,054					91,2	94,14					Sekretaris DPRD
	Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	120,649,100,319	100%	125,243,234,593	100%	369,905,309,815	100%	128,068,436,605	100%	118,368,436,605	100%	123,468,436,605	100%	120,568,582,054					100 %	94,14					Sekretaris DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	88	65,304,657,308	88	71,478,428,478	Point A (85)	236,553,137,459	Point BB (79)	78,948,221,624	Point A (82)	77,527,186,057	Point A (85)	80,077,729,778	Point BB (72,05)	70,568,136,612					91,20	89.39					Sekretaris DPRD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22	492,881,904	28	463,766,540	66	2,010,202,389	22	607,311,900	22	668,043,090	22	734,847,399	22	430,922,620					100	70.96					Kabag. Keuangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	182,286,104	2	179,382,640	3	649,922,472	1	196,351,200	1	215,986,320	1	237,584,952	1	129,618,720					100	66.01					Kabag. Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	61,446,100	1	47,324,300	3	272,649,334	1	82,371,400	1	90,608,540	1	99,669,394	1	50,607,300					100	61.44					Kabag. Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	100,102,500	2	64,105,800	3	391,620,664	1	118,314,400	1	130,145,840	1	143,160,424	1	78,726,500					100	66.54					Kabag. Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5,744,000	0	10,179,000	3	43,256,073	1	13,068,300	1	14,375,130	1	15,812,643	1	11,433,600					100	87.49					Kabag. Keuangan

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	17,814,500	1	19,273,000	3	100,240,040	1	30,284,000	1	33,312,400	1	36,643,640	1	20,901,000					100	69.02					Kabag. Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	29,902,700	1	29,340,800	3	140,314,872	1	42,391,200	1	46,630,320	1	51,293,352	1	32,554,500					100.00	76.80					Kabag. Keuangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	95,586,000	21	114,161,000	48	412,198,934	16	124,531,400	16	136,984,540	16	150,682,994	16	107,081,000					100	85.99					Kabag. Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	5	12,264,257,242	5	11,792,422,219	100	42,923,906,439	100	13,501,030,185	100	14,272,099,825	100	15,150,776,429	100	13,745,761,912					100	101.81					Kabag. Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129	11,643,104,382	123	11,150,822,019	123	40,406,001,355	123	12,740,333,785	123	13,435,333,785	123	14,230,333,785	119	13,197,023,742					96.75	103.58					Kabag. Keuangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	227,764,880	6	310,955,900	3	1,132,278,511	1	342,078,100	1	376,285,910	1	413,914,501	1	297,732,920					100	87.04					Kabag. Keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14048	209,907,100	##	253,600,700	22500	727,083,537	7500	219,662,700	7500	241,628,970	7500	265,791,867	11365	221,629,850					151.53	100.90					Kabag. Keuangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	29.534.300	1	28.080.000	3	99.990.466	1	30.208.600	1	33.229.460	1	36.552.406	1	27.900.000					100	92.36					Kabag. Keuangan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	153.946.580	1	48.963.600	3	558.552.570	1	168.747.000	1	185.621.700	1	204.183.870	1	1.475.400					100	0.87					Kabag. Keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	7	3.970.000	11	10.430.000	3	61.152.250	1	18.475.000	1	20.322.500	1	22.354.750	100	23.610.000					1000.00	127.79					Kabag. Umum dan Humas
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	1.625.000	8	-	6	6.653.100	2	2.010.000	2	2.211.000	2	2.432.100	2	-					100	0.00					Kabag. Umum dan Humas
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2.345.000	3	1.440.000	6	24.742.250	2	7.475.000	2	8.222.500	2	9.044.750	2	2.880.000					100	38.53					Kabag. Umum dan Humas
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	-	2	8.990.000	3	29.756.900	1	8.990.000	1	9.889.000	1	10.877.900	1	20.730.000					100	230.59					Kabag. Umum dan Humas
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4	927.927.980	3	713.064.975	3	3.120.096.429	1	943.995.900	1	1.037.095.490	1	1.139.005.039	1	1.308.665.100					100	138.63					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	129	253.786.000	123	274.690.000	6	1.435.699.922	2	433.746.200	2	477.120.820	2	524.832.902	2	410.255.000					100	94.58					Sub Bagian TU
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	510.522.000	0	53.617.500	3	177.473.925	1	53.617.500	1	58.979.250	1	64.877.175	1	750.501.500					100	1399.73					Kabag. Umum dan Humas
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129	65.619.980	123	204.397.242	3	628.179.082	1	189.782.200	1	208.760.420	1	229.636.462	1	36.908.600					100	19.45					Sub Bagian TU
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	0	-	12	135.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	0	-					0	0.00					Sub Bagian TU
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-	150	69.000.000	50	23.000.000	50	23.000.000	50	23.000.000	0	-					0	0.00					Kabag. Keuangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	98.000.000	7	180.360.233	60	674.743.500	20	203.850.000	20	224.235.000	20	246.658.500	16	111.000.000					80,00	54.45					Sub Bagian TU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	9	4.255.533.549	9	4.292.500.852	100	11.425.009.760	100	3.451.664.580	100	3.796.831.038	100	4.176.514.142	100	5.253.371.610					100	152.20					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan	4	123.835.000	4	122.040.000	3	392.102.600	1	118.460.000	1	130.306.000	1	143.336.600	1	72.680.000					100	61.35					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penangg ungjawa b	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor yang Disediakan					K		K		K		K		K		K		K		K		K		K		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	890.109.000	33	241.125.100	3	1.117.663.206	1	337.662.600	1	371.428.860	1	408.571.746	1	581.734.650					100	172.28					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22	138.219.625	25	253.075.330	3	757.874.084	1	228.964.980	1	251.861.478	1	277.047.626	1	243.419.115					100	106.31					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	49.530.000	7	97.383.000	3	340.228.280	1	102.788.000	1	113.066.800	1	124.373.480	1	99.530.000					100	96.83					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3	168.664.400	3	171.520.000	7	575.873.800	7	173.980.000	7	191.378.000	7	210.515.800	7	165.950.000					100	95.38					Kabag. Umum dan Humas
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6081	1.968.527.024	5943	2.191.267.922	3	5.130.500.000	1	1.550.000.000	1	1.705.000.000	1	1.875.500.000	1	2.394.864.445					100	154.51					Kabag. Umum dan Humas
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	882.994.000	43	1.046.785.000	3	2.368.967.000	1	715.700.000	1	787.270.000	1	865.997.000	1	1.616.900.000					100	225.92					Kabag. Umum dan Humas
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	22.354.500	9	104.794.500	3	494.576.890	1	149.419.000	1	164.360.900	1	180.796.990	1	24.744.400					100	16.56					Sub Bagian TU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15	11.300.000	15	64.510.000	3	247.223.900	1	74.690.000	1	82.159.000	1	90.374.900	1	53.549.000					100	71.70					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2	60.660.000	4	4.116.037.450	4	8.793.203.236	4	4.416.893.000	4	2.200.060.207	4	2.176.250.030	10	473.050.000					250	10.71					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	2	3.319.060.000	12	4.975.401.904	4	3.062.930.000	4	910.700.907	4	1.001.770.998		-					0	0.00					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	2	73.580.000	27	253.463.250	9	76.575.000	9	84.232.500	9	92.655.750		-					0	0.00					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	23.750.000	1	180.197.450	3	615.660.000	1	186.000.000	1	204.600.000	1	225.060.000	1	332.950.000					100	179.01					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	36.910.000	1	543.200.000	27	2.948.678.082	9	1.091.388.000	9	1.000.526.800	9	856.763.282	9	140.100.000					100	12.84					Kabag. Umum dan Humas
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0	#DIV/0!					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	5,318,867,133	3	6,075,529,412	100	20,112,689,902	100	6,076,341,360	100	6,683,975,496	100	7,352,373,046	100	5,837,591,273					100	96.07					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2114	18,362,500	3594	18,337,500	3	69,096,250	1	20,875,000	1	22,962,500	1	25,258,750	1	50,194,000					100	240.45					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	821,929,553	4	931,233,232	3	3,194,444,590	1	965,089,000	1	1,061,597,900	1	1,167,757,690	1	800,260,353					100	82.92					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	134	4,478,575,080	158	5,125,958,680	3	16,849,149,062	1	5,090,377,360	1	5,599,415,096	1	6,159,356,606	1	4,987,136,920					100	97.97					Kabag. Umum dan Humas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6	1,682,151,341	6	2,274,638,794	6	10,874,026,649	6	4,676,151,119	6	2,951,369,300	6	3,246,506,230	90	1,865,334,243					1500	39.89					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	165,431,595	4	167,326,329	12	554,756,000	4	167,600,000	4	184,360,000	4	202,796,000	4	121,024,999					100	72.21					Kabag. Umum dan Humas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	634,717,396	67	643,029,465	198	2,204,989,600	66	666,160,000	66	732,776,000	66	806,053,600	66	666,007,534					100	99.98					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penangg ungjawa b	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	12.075.000	6	23.850.000	18	91.025.000	6	27.500.000	6	30.250.000	6	33.275.000	6	9.250.000					100	33.64					Kabag. Umum dan Humas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	178.729.800	17	261.500.000	30	1.381.454.980	10	417.358.000	10	459.093.800	10	505.003.180	10	310.892.750					100	74.49					Kabag. Umum dan Humas
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	691.197.550	4	-	3	115.850.000	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	7.404.460					100	21.16					Kabag. Umum dan Humas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	3	1.178.933.000	9	6.525.951.069	3	3.362.533.119	3	1.506.389.500	3	1.657.028.450	3	750.754.500					100	22.33					Kabag. Umum dan Humas
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	2	39,541,138,659	2	40,939,102,011	3	134,177,619,240	3	44,309,253,080	3	44,889,853,080	3	44,978,513,080	2	40,939,513,729					66.67	92.39					Kabag. umum dan Humas / Kabag. Keuangan
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	65	39.269.370.675	65	40.528.536.011	65	131.509.759.240	65	43.503.253.080	65	44.003.253.080	65	44.003.253.080	65	40.333.713.729					100	92.71					Kabag. Keuangan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	0	-	3	410.566.000	6	1.376.960.000	2	416.000.000	2	457.600.000	2	503.360.000	2	605.800.000					100	145.63					Kabag. Umum dan Humas
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65	271.767.984	0	-	65	1.290.900.000	65	390.000.000	65	429.000.000	65	471.900.000	0	-					0	0.00					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penangg ungjawa b	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	3	757,269,500	3	800,936,225	4	3,055,231,165	4	947,105,500	4	1,007,536,031	4	1,100,589,634	3	690,316,125					75	72.89					Kabag. umum dan Humas / Kabag. Persida n dan Perudan g- undanga n
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	-	0	-	3	218,000,000	1	68,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000		-					0	0.00					Kabag. Persidan gan dan Perudan g- undanga n
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	117	173,132,100	117	242,280,100	3	936,038,661	1	304,727,100	1	300,719,791	1	330,591,770	1	188,975,020					100	62.01					Kabag. Persidan gan dan Perudan g- undanga n
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	42	128,690,000	65	139,281,400	3	510,992,504	1	154,378,400	1	169,816,240	1	186,797,864	1	135,552,600					100	87.81					Kabag. Persidan gan dan Perudan g- undanga n
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2	455,447,400	3	419,374,725	9	1,390,200,000	3	420,000,000	3	462,000,000	3	508,200,000	3	365,788,505					100	87.09					Kabag. Umum dan Humas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	55,344,443,011	100	53,764,806,115	100	133,352,172,356	100	49,120,214,981	100	40,841,250,548	100	43,390,706,827	100	50,000,445,442					100	101.79					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9	11,991,045,821	19	1,065,350,100	27	15,351,369,293	9	4,909,930,300	9	5,095,923,330	9	5,345,515,663	12	949,778,700					133.33	19.34					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9	622,307,800	0	638,628,100	18	2,550,907,108	6	770,666,800	6	847,733,480	6	932,506,828	-						0	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	8	136,691,500	13	128,170,000	36	876,691,565	12	264,861,500	12	291,347,650	12	320,482,415	12	132,729,700					100	50.11					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	10,936,726,521			3	10,500,000,000	1	3,450,000,000	1	3,500,000,000	1	3,550,000,000	1	817,049,000					100	23.68					Kabag. Persidangan dan Perundangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	6	295.320.000	6	298.552.000	3	998.137.120	1	301.552.000	1	331.707.200	1	364.877.920	0	-					0	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	0	-	0		3	75.633.500	1	22.850.000	1	25.135.000	1	27.648.500	-						0	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0	-	0	-	300	350.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	-						0.00	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4	735.659.300	5	734.330.500	15	4.500.213.110	5	1.359.581.000	5	1.495.539.100	5	1.645.093.010	5	436.334.500					100.00	32.09					Kabag. Keuangan
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10	234.849.000	13	154.558.000	3	1.343.024.225	1	405.747.500	1	446.322.250	1	490.954.475	1	68.745.500					100	16.94					Kabag. Keuangan
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10	68.354.000	10	96.083.500	3	1.208.098.695	1	364.984.500	1	401.482.950	1	441.631.245	1	57.048.000					100	15.63					Kabag. Keuangan
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	9	179.436.300	11	151.746.000	3	618.231.870	1	186.777.000	1	205.454.700	1	226.000.170	1	78.613.000					100	42.09					Kabag. Keuangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	17	150.660.000	15	198.235.000	3	805.591.110	1	243.381.000	1	267.719.100	1	294.491.010	1	118.833.000					100	48.83					Kabag. Keuangan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18	102.360.000	8	133.708.000	3	525.267.210	1	158.691.000	1	174.560.100	1	192.016.110	1	113.095.000					100	71.27					Kabag. Keuangan
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5	400.514.600	5	373.354.000	21	1.909.258.464	7	566.694.400	7	638.363.840	7	704.200.224	5	196.990.520					71.43	34.76					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	26	79.016.700	21	64.865.900	3	268.799.804	1	81.208.400	1	89.329.240	1	98.262.164	1	30.509.450					100	37.57					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	34	92.979.700	20	71.996.400	3	319.812.531	1	96.620.100	1	106.282.110	1	116.910.321	1	49.089.570					100	50.81					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	33	80.668.500	8	60.040.000	3	303.279.743	1	91.625.300	1	100.787.830	1	110.866.613	1	40.547.630					100	44.25					Kabag. Persidangan dan Perundangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	28	76.276.900	35	82.538.900	3	243.683.193	1	73.620.300	1	80.982.330	1	89.080.563	1	42.330.170					100	57.50					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	23	71.572.800	25	93.912.800	3	243.683.193	1	73.620.300	1	80.982.330	1	89.080.563	1	34.513.700					100	46.88					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	-	0		3	420.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	0	-					0	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	-	0	-	3	110.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	0	-					0	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65	5.071.110.227	65	5.690.935.386	65	20.173.088.266	65	6.094.588.600	65	6.704.047.460	65	7.374.452.206	65	4.037.838.168					100	66.25					Kabag. Persidangan dan Perundangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	-	0	-	3	1,324,000,000	1	400,000,000	1	440,000,000	1	484,000,000	1	1,095,881,420					100.00	273.97					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65	2,778,814,527	249	3,429,829,261	65	10,732,899,418	65	3,242,567,800	65	3,566,824,580	65	3,923,507,038	65	978,962,798					100.00	30.19					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	47	198,900,000	62	586,500,000	300	1,476,855,800	100	446,180,000	100	490,798,000	100	539,877,800	36	423,300,000					36.00	94.87					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	432,000,000	9	449,692,800	27	1,508,374,944	9	455,702,400	9	501,272,640	9	551,399,904	9	439,111,700					100.00	96.36					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	925	98,447,500	895	96,630,000	3	359,664,600	1	108,660,000	1	119,526,000	1	131,478,600	1	17,450,000					100.00	16.06					Kabag. Umum dan Humas
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	925	98,447,500	895	96,630,000	3	198,526,849	1	59,977,900	1	65,975,690	1	72,573,259	0	-					0.00	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																											g-undangan
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	26.618.500	1	18.065.900	3	4.572.766.655	1	1.381.500.500	1	1.519.650.550	1	1.671.615.605	1	1.083.132.250			100.00		78.40						Kabag. Umum dan Humas
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	4	28.485.174.179	5	33.707.708.890	9	59.829.703.889	3	26.432.469.100	3	16.171.556.505	3	17.225.678.285	3	25.005.044.586			100.00		94.60						Kabag. Persidangan dan Perudangan
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2570	7.128.779.669	3713	7.104.140.494	3	25.426.820.000	1	8.202.200.000	1	8.202.200.000	1	9.022.420.000	1	7.397.851.048			100.00		90.19						Kabag. Persidangan dan Perudangan
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	77.503.000	2	152.807.000	6	1.020.135.380	2	308.198.000	2	339.017.800	2	372.919.580	2	43.715.000			100.00		14.18						Kabag. Keuangan
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	21.278.891.510	3	26.450.761.396	9	33.082.748.509	3	17.822.071.100	3	7.530.338.705	3	7.730.338.705	2	17.563.478.538			66.67		98.55						Kabag. Persidangan dan Perudangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	-	0	-	600	300.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	0	-					0.00	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	1	8,392,500	2	4,386,400	6	120,180,473	2	36,308,300	2	39,939,130	2	43,933,043	2	31,176,200					100.00	85.87					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	6,304,200	2	3,636,400	3	95,481,584	1	28,846,400	1	31,731,040	1	34,904,144	1	22,450,000					100.00	77.83					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	2,088,300	0	750,000	3	24,698,889	1	7,461,900	1	8,208,090	1	9,028,899	1	8,726,200					100.00	116.94					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	4	8,652,546,384	3	12,188,740,839	5	31,468,358,861	5	9,720,643,281	5	10,695,881,184	5	11,051,834,396	3	19,343,282,768					60.00	198.99					Kabag. Persidangan dan Perundangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan				Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun						Unit Penanggungjawab	
			2022		2023			2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026			
1	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14		15		16=13/10*100		17=14/11*100		18=15/12*100%		19
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	612	8.044.842.884	1146	11.430.122.139	3	28.077.329.428	1	8.713.266.881	1	9.687.872.144	1	9.676.190.403	1	18.601.896.568					100.00	213.49					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1	-	0	-	3	35.334.250	1	10.675.000	1	11.742.500	1	12.916.750	0	-					0.00	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	22	69.105.300	27	59.762.100	3	270.864.251	1	81.832.100	1	90.015.310	1	99.016.841	1	63.231.500					100.00	77.27					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	538.598.200	4	698.856.600	3	2.337.436.933	1	706.174.300	1	776.791.730	1	854.470.903	1	678.154.700					100.00	96.03					Kabag. Persidangan dan Perundangan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0	-	0	-	3	747.393.999	1	208.695.000	1	129.459.499	1	409.239.499	0	-					0.00	0.00					Kabag. Persidangan dan Perundangan

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Lampiran Laporan 2.

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Pelaksanaan Tahun 2024
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada Sasaran RKPd Provinsi NTB

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Point A (85)	236,553,137,459		136,783,085,786	Point 88 (79)	74,219,854,919	Point 88 (72,05)	70,568,136,612	96,20	95,08	Point 88 (72,05)	70,568,136,612	84,76	29,83	Sekretariat DPRD
	Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			100%	133,352,172,356		109,109,249,126	100%	55,857,183,420	100%	50,000,445,442	100%	89,51	100%	50,000,445,442	100 %	37,50	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup DPD	Point A (85)	236,553,137,459	88	136,783,085,786	Point 88 (79)	74,219,854,919	Point 88 (72,05)	70,568,136,612	96,07	95,08	Point 88 (72,05)	70,568,136,612	91,20	29,83	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	66	2,010,202,389	50	956,648,444	22	576,441,700	22	430,922,620	100	74,76	22	430,922,620	33,33	21,44	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	649,922,472	3	361,668,744	1	186,337,900	1	129,618,720	100	69,56	1	129,618,720	33,33	19,94	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	272.648.334	2	108.770.400	1	83.834.100	1	50.607.300	100	60.37	1	50.607.300	33.33	18.56	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	391.620.664	3	164.208.300	1	93.733.600	1	78.726.500	100	83.99	1	78.726.500	33.33	20.10	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	43.256.073	1	15.923.000	1	13.048.300	1	11.433.600	100	87.63	1	11.433.600	33.33	26.43	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	100.240.040	2	37.087.500	1	30.184.000	1	20.901.000	100	69.25	1	20.901.000	33.33	20.85	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	140.314.872	2	59.243.500	1	40.292.400	1	32.554.500	100	80.80	1	32.554.500	33.33	23.20	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	412.198.934	37	209.747.000	16	129.011.400	16	107.081.000	100	83.00	16	107.081.000	33.33	25.98	Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	42.923.906.439	10	24.056.679.461	100	14.830.918.043	100	13.745.761.912	100	92.06	100	13.745.761.912	100.00	32.02	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123	40.406.001.355	252	22.793.926.401	123	14.359.262.193	119	13.197.023.742	96.748	91.91	119	13.197.023.742	96.75	32.66	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1.132.278.511	12	538.720.780	1	316.083.600	1	297.732.920	100	94.19	1	297.732.920	33.33	26.30	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22500	727.083.537	####	463.507.800	7500	223.923.250	11365	221.629.850	151.53	98.98	11365	221.629.850	50.51	30.48	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	99.990.466	2	57.614.300	1	30.173.600	1	27.900.000	100	92.46	1	27.900.000	33.33	27.90	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	558.552.570	2	202.910.180	1	1.475.400	1	1.475.400	100	100.00	1	1.475.400	33.33	0.26	Sekretariat DPRD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	61.152.250	18	14.400.000	100	37.962.000	100	23.610.000	100	62.19	100	23.610.000	100.00	38.61	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	6.653.100	13	1.625.000	2	3.531.000	2	-	100	-	2	-	33.33	-	Sekretariat DPRD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	24.742.250	5	3.785.000	2	4.521.000	2	2.880.000	100	63.70	2	2.880.000	33.33	11.64	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	29.756.900	4	8.990.000	1	29.910.000	1	20.730.000	100	69.31	1	20.730.000	33.33	69.66	Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3	3.120.096.429	7	1.640.992.955	1	1.460.323.700	1	1.308.665.100	100	89.61	1	1.308.665.100	33.33	41.94	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	1.435.699.922	252	528.476.000	2	470.250.000	2	410.255.000	100	87.24	2	410.255.000	33.33	28.58	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	177.473.925	2	564.139.500	1	750.604.500	1	750.501.500	100	99.99	1	750.501.500	33.33	####	Sekretariat DPRD
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	628.179.082	252	270.017.222	1	39.959.200	1	36.908.600	100	92.37	1	36.908.600	33.33	5.88	Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	135.000.000	0	-	4	22.000.000	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	69.000.000	0	-	50	-			0	#DIV/0!			0.00	-	Sekretariat DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	674.743.500	28	278.360.233	20	177.510.000	16	111.000.000	80	62.53	16	111.000.000	26.67	16.45	Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	11.425.009.760	18	8.548.034.401	100	5.764.775.050	100	5.253.371.610	100	91.13	100	5.253.371.610	100.00	45.98	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	392.102.600	8	245.875.000	1	72.680.000	1	72.680.000	100	100.00	1	72.680.000	33.33	18.54	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1.117.663.206	69	1.131.234.100	1	629.229.650	1	581.734.650	100	92.45	1	581.734.650	33.33	52.05	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	757.874.084	47	391.294.955	1	267.240.300	1	243.419.115	100	91.09	1	243.419.115	33.33	32.12	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	340.228.280	14	146.913.000	1	102.788.000	1	99.530.000	100	96.83	1	99.530.000	33.33	29.25	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	575.873.800	6	340.184.400	7	170.680.000	7	165.950.000	100	97.23	7	165.950.000	100.00	28.82	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	5.130.500.000	####	4.159.794.946	1	2.631.100.000	1	2.394.864.445	100	91.02	1	2.394.864.445	33.33	46.68	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	2.368.967.000	85	1.929.779.000	1	1.791.595.000	1	1.616.900.000	100	90.25	1	1.616.900.000	33.33	68.25	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	494.576.890	12	127.149.000	1	24.796.100	1	24.744.400	100	99.79	1	24.744.400	33.33	5.00	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	247.223.900	30	75.810.000	1	74.666.000	1	53.549.000	100	71.72	1	53.549.000	33.33	21.66	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4	8.793.203.236	6	4.176.697.450	10	537.529.660	10	473.050.000	100	88.00	10	473.050.000	250.00	5.38	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	4.975.401.904	2	3.319.060.000	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27	253.463.250	2	73.580.000	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	-	0	-	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	615.660.000	2	203.947.450	1	355.264.660	1	332.950.000	100	93.72	1	332.950.000	33.33	54.08	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	2.948.678.082	2	580.110.000	9	182.265.000	9	140.100.000	100	76.87	9	140.100.000	33.33	4.75	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	20,112,689,902	6	11,394,396,545	100	6,252,769,520	100	5,837,591,273	100	93.36	100	5,837,591,273	100.00	29.02	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	69,096,250	5708	36,700,000	1	78,849,000	1	50,194,000	100	63.66	1	50,194,000	33.33	72.64	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3,194,444,590	8	1,753,162,785	1	964,000,000	1	800,260,353	100	83.01	1	800,260,353	33.33	25.05	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	16,849,149,062	292	9,604,533,760	1	5,209,920,520	1	4,987,136,920	100	95.72	1	4,987,136,920	33.33	29.60	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	186	10,874,026,649	12	3,956,790,135	90	2,058,082,000	90	1,865,334,243	100	90.63	90	1,865,334,243	48.39	17.15	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	554,756,000	8	332,757,924	4	167,600,000	4	121,024,999	100	72.21	4	121,024,999	33.33	21.82	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198	2.204.989.600	133	1.277.746.861	66	730.470.000	66	666.007.534	100	91.18	66	666.007.534	33.33	30.20	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18	91.025.000	12	35.925.000	6	17.500.000	6	9.250.000	100	52.86	6	9.250.000	33.33	10.16	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	1.381.454.980	34	440.229.800	10	355.446.000	10	310.892.750	100	87.47	10	310.892.750	33.33	22.50	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	115.850.000	5	691.197.550	1	35.000.000	1	7.404.460	100	21.16	1	7.404.460	33.33	6.39	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	6.525.951.069	3	1.178.933.000	3	752.066.000	3	750.754.500	100	99.83	3	750.754.500	33.33	11.50	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0				0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3	134.177.619.240	4	80.480.240.670	2	41.721.238.426	2	40.939.513.729	100	98.13	2	40.939.513.729	66.67	30.51	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	65	131.509.759.240	130	79.797.906.686	65	41.113.488.426	65	40.333.713.729	100	98.10	65	40.333.713.729	100.00	30.67	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6	1.376.960.000	3	410.566.000	2	607.750.000	2	605.800.000	100	99.68	2	605.800.000	33.33	44.00	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65	1.290.900.000	65	271.767.984	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4	3.055.231.165	6	1.558.205.725	3	879.814.820	3	690.316.125	100	78.46	3	690.316.125	75.00	22.59	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3	218.000.000	0	-	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	3	936.038.661	234	415.412.200	1	311.184.220	1	188.975.020	100	60.73	1	188.975.020	33.33	20.19	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3	510.992.504	107	267.971.400	1	148.630.600	1	135.552.600	100	91.20	1	135.552.600	33.33	26.53	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9	1.390.200.000	5	874.822.125	3	420.000.000	3	365.788.505	100	87.09	3	365.788.505	33.33	26.31	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	133.352.172.356	200	109.109.249.126	100	55.857.183.420	100	50.000.445.442	100	89.51	100	50.000.445.442	100.00	37.50	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	27	15.351.369.293	28	13.056.395.921	9	1.541.334.500	12	949.778.700	133.33	61.62	12	949.778.700	44.44	6.19	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	18	2.550.907,108	9	1.260.935,900	0	-		-	0	#DIV/0!		-	0,00	-	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	36	876.691,565	21	264.861,500	12	293.218,500	12	132.729,700	100	45,27	12	132.729,700	33,33	15,14	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	10.500.000,000	3	10.936.726,521	1	1.213.336,000	1	817.049,000	100	67,34	1	817.049,000	33,33	7,78	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	3	998.137,120	12	593.872,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	3	75.633,500	1	-	1	34.780,000		-	0	-		-	0,00	-	Sekretariat DPRD
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	300	350.000,000			0	-		-	0	-		-	0,00	-	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	15	4.500,213,110	9	1.469,989,800	5	654,466,200	5	436,334,500	100	66,67	5	436,334,500	33,33	9,70	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	1.343.024.225	23	389.407.000	1	92.966.200	1	68.745.500	100	73.95	1	68.745.500	33.33	5.12	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	1.208.098.695	20	164.437.500	1	92.609.000	1	57.048.000	100	61.60	1	57.048.000	33.33	4.72	Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	618.231.870	20	331.182.300	1	142.801.000	1	78.613.000	100	55.05	1	78.613.000	33.33	12.72	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	3	805.591.110	32	348.895.000	1	203.509.000	1	118.833.000	100	58.39	1	118.833.000	33.33	14.75	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	525.267.210	26	236.068.000	1	122.581.000	1	113.095.000	100	92.26	1	113.095.000	33.33	21.53	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	21	1.909.258.464	10	773.868.600	5	608.583.570	5	196.990.520	100	32.37	5	196.990.520	23.81	10.32	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	268.799.804	47	143.882.600	1	125.118.500	1	30.509.450	100	24.38	1	30.509.450	33.33	11.35	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	319.812.531	54	164.976.100	1	118.123.170	1	49.089.570	100	41.56	1	49.089.570	33.33	15.35	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	303.279.743	41	140.708.500	1	130.477.330	1	40.547.630	100	31.08	1	40.547.630	33.33	13.37	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	243.683.193	63	158.815.800	1	118.123.170	1	42.330.170	100	35.84	1	42.330.170	33.33	17.37	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	243.683.193	48	165.485.600	1	116.741.400	1	34.513.700	100	29.56	1	34.513.700	33.33	14.16	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	420.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65	20.173.088.266	130	10.762.045.613	65	4.690.744.800	65	4.037.838.168	100	86.08	65	4.037.838.168	100.00	20.02	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	3	1.324.000.000			1	1.097.931.600	1	1.095.881.420	100	99.81	1	1.095.881.420	33.33	82.77	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65	10.732.899.418	314	6.208.643.788	65	987.799.500	65	978.962.798	100	99.11	65	978.962.798	100.00	9.12	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180	1.476.855.800	109	785.400.000	100	789.400.000	36	423.300.000	36	53.62	36	423.300.000	20.00	28.66	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25	1.508.374.944	18	881.692.800	9	454.760.200	9	439.111.700	100	96.56	9	439.111.700	36.00	29.11	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	359.664.600	1820	195.077.500	1	25.500.000	1	17.450.000	100	68.43	1	17.450.000	33.33	4.85	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3	198.526.849	2	44.684.400	1	14.298.500	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3	4.572.766.655	102	2.646.547.125	1	1.321.055.000	1	1.083.132.250	100	81.99	1	1.083.132.250	33.33	23.69	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	9	59.829.703.889	9	62.192.883.069	3	26.640.116.150	3	25.005.044.586	100	93.86	3	25.005.044.586	33.33	41.79	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	25.426.820.000	6283	14.232.920.163	1	8.753.600.000	1	7.397.851.048	100	84.51	1	7.397.851.048	33.33	29.09	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	6	1.020.135.380	3	230.310.000	2	64.555.000	2	43.715.000	100	67.72	2	43.715.000	33.33	4.29	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9	33.082.748.509	6	47.729.652.906	2	17.821.961.150	2	17.563.478.538	100	98.55	2	17.563.478.538	22.22	53.09	Sekretariat DPRD
		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	400	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	6	120.180.473	3	12.778.900	2	68.953.800	2	31.176.200	100	45.21	2	31.176.200	33.33	25.94	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	3	95.481.584	3	9.940.600	1	39.861.400	1	22.450.000	100	56.32	1	22.450.000	33.33	23.51	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	24.698.889	0	2.838.300	1	29.092.400	1	8.726.200	100	29.99	1	8.726.200	33.33	35.33	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	5	31.468.358.861	7	20.841.287.223	3	21.652.984.400	3	19.343.282.768	100	89.33	3	19.343.282.768	60.00	61.47	Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	28.077.329.428	1758	19.474.965.023	1	20.654.400.000	1	18.601.896.568	100	90.06	1	18.601.896.568	33.33	66.25	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	3	35.334.250	1	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA DPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sampai tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	270.864.251	49	128.867.400	1	78.556.500	1	63.231.500	100	80.49	1	63.231.500	33.33	23.34	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	2.337.436.933	8	1.237.454.800	1	920.027.900	1	678.154.700	100	73.71	1	678.154.700	33.33	29.01	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3	747.393.999	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Lampiran Laporan 3.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2024

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB											
BELANJA SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB				130,077,038,339	Point 88 (72,05)	120,568,582,054					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Point 88 (79)	74,219,854,919	Point 88 (72,05)	70,568,136,612	91.20	95.08	Prov NTB		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22	576,441,700	22	430,922,620	100.00	74.76	Prov NTB		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Renstra, Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	186,337,900	1	129,618,720	100.00	69.56	Prov NTB		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	83,834,100	1	50,607,300	100.00	60.37	Prov NTB		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	93,733,600	1	78,726,500	100.00	83.99	Prov NTB		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13,048,300	1	11,433,600	100.00	87.63	Prov NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	30,184,000	1	20,901,000	100.00	69.25	Prov NTB		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan LKJIP, LKPJ-LPPD dan RKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	40,292,400	1	32,554,500	100.00	80.80	Prov NTB		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan bulanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	129,011,400	16	107,081,000	100.00	83.00	Prov NTB		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	14,930,918,043	100	13,745,761,912	100.00	92.06	Prov NTB		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123	14,359,262,193	119	13,197,023,742	96.75	91.91	Prov NTB		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat SPT/ SPPD serta SPJ bagi ASN yang melaksanakan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	316,083,600	1	297,732,920	100.00	94.19	Prov NTB		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melakukan Verifikasi dokumen SPJ Belanja pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500	223,923,250	11365	221,629,850	151.53	98.98	Prov NTB		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Dokumen Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	30,173,600	1	27,900,000	100.00	92.46	Prov NTB		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan Bahan Pemeriksaan yang dilakukan BPK dan Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1,475,400	1	1,475,400	100.00	100.00	Prov NTB		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	37,962,000	100	23,610,000	100.00	62.19	Prov NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	3,531,000	2	-	100.00	-	Prov NTB		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Menyusun Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	4,521,000	2	2,880,000	100.00	63.70	Prov NTB		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	29,910,000	1	20,730,000	100.00	69.31	Prov NTB		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1	1,460,323,700	1	1,308,665,100	100.00	89.61	Prov NTB		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Menyiapkan Daftar Hadir dan Absensi Elektronik	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	470,250,000	2	410,255,000	100.00	87.24	Prov NTB		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menyiapkan Atribut Pakaian Dinas seperti Papan Nama, Lencana Korpi serta Tanda Pengenal Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	750,604,500	1	750,501,500	100.00	99.99	Prov NTB		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Membuat Buku Penjagaan Terkait dengan SKP, Model DK, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	39,959,200	1	36,908,600	100.00	92.37	Prov NTB		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	22,000,000	0	-	-	-	Prov NTB		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan Bimbingan Teknis dalam rangka implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	177,510,000	16	111,000,000	80.00	62.53	Prov NTB		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	5,764,775,050	100	5,253,371,610	100.00	91.13	Prov NTB		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	72,680,000	1	72,680,000	100.00	100.00	Prov NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	629,229,650	1	581,734,650	100.00	92.45	Prov NTB		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meyediakan ATK, Makan Minum Rapat dan Bahan cetak Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	267,240,300	1	243,419,115	100.00	91.09	Prov NTB		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	102,788,000	1	99,530,000	100.00	96.83	Prov NTB		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan seperti koran, peraturan undang-undang dan buletin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	170,680,000	7	165,950,000	100.00	97.23	Prov NTB		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melakukan fasilitasi tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2,631,100,000	1	2,394,864,445	100.00	91.02	Prov NTB		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,791,595,000	1	1,616,900,000	100.00	90.25	Prov NTB		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melakukan penataan arsip SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	24,796,100	1	24,744,400	100.00	99.79	Prov NTB		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melakukan Suport terhadap pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	74,666,000	1	53,549,000	100.00	71.72	Prov NTB		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	10	537,529,660	10	473,050,000	100.00	88.00	Prov NTB		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-		-			Prov NTB		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-		-			Prov NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Mebel	Melakukan Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor dan Meja Kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	355.264.660	1	332.950.000	100.00	93.72	Prov NTB		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pengadaan Komputer, Printer,	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	182.265.000	9	140.100.000	100.00	76.87	Prov NTB		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	6,252,769,520	100	5,837,591,273	100.00	93.36	Prov.NTB		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melakukan Pengadministrasian Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	78.849.000	1	50.194.000	100.00	63.66	Prov.NTB		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	964.000.000	1	800.260.353	100.00	83.01	Prov.NTB		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan jasa pelayanan kantor berupa Tenaga Administrasi, Tenaga keamanan dan Tenaga Kebersihan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	5.209.920.520	1	4.987.136.920	100.00	95.72	Prov.NTB		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	90	2,058,082,000	90	1,865,334,243	100.00	90.63	Prov.NTB		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	167.600.000	4	121.024.999	100.00	72.21	Prov.NTB		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Melakukan Pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	730.470.000	66	666.007.534	100.00	91.18	Prov.NTB		
Pemeliharaan Mebel	Melakukan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	17.500.000	6	9.250.000	100.00	52.86	Prov.NTB		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan pemeliharaan laptop, pc, printer	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	355.446.000	10	310.892.750	100.00	87.47	Prov.NTB		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Melakukan pemeliharaan aset	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	35.000.000	1	7.404.460	100.00	21.16	Prov.NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Taman Sekretariat dan Gedung DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	752.066.000	3	750.754.500	-	-	Prov.NTB		
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	2	41,721,238,426	2	40,939,513,729	100.00	98.13	Prov.NTB		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Membuat Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	65	41,113,488.426	65	40,333,713,729	100.00	98.10	Prov.NTB		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Menyediakan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2	607,750.000	2	605.800.000	100.00	99.68	Prov.NTB		
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Melaksanakan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	-	0	-	-	-	Prov.NTB		
Layanan Adminstrasi DPRD		Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	3	879,814,820	3	690,316,125	100.00	78.46	Prov.NTB		
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Menyusun Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	-		-	-	-	Prov.NTB		
Fasilitasi Fraksi DPRD	Memfasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1	311,184.220	1	188,975.020	100.00	60.73	Prov.NTB		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Memfasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	148,630.600	1	135,552.600	100.00	91.20	Prov.NTB		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	420.000.000	3	365,788.505	100.00	87.09	Prov.NTB		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	55,857,183,420	100	50,000,445,442	100.00	89.51	Prov.NTB		
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9	1,541,334,500	12	949,778,700	133.33	61.62	Prov.NTB		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Menyusun program pembentukan perda (propemperda)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan	0	-		-	-	-	Prov.NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Pembentukan Peraturan Daerah									
Pembahasan Rancangan Perda	Membahas Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12	293.218.500	12	132.729.700	100.00	45.27	Prov.NTB		
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Melaksanakan sosialisasi perda	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	1.213.336.000	1	817.049.000	100.00	67.34	Prov.NTB		
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	0	-	0	-	-	-	Prov.NTB		
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Menyusun dokumen tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	34.780.000		-	-	-	Prov.NTB		
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5	654.466.200	5	436.334.500	100.00	66.67	Prov.NTB		
Pembahasan KUA dan PPAS	Memfasilitasi rapat pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	92.966.200	1	68.745.500	100.00	73.95	Prov.NTB		
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	92.609.000	1	57.048.000	100.00	61.60	Prov.NTB		
Pembahasan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	142.801.000	1	78.613.000	100.00	55.05	Prov.NTB		
Pembahasan Perubahan APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	203.509.000	1	118.833.000	100.00	58.39	Prov.NTB		
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Memfasilitasi rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	122.581.000	1	113.095.000	100.00	92.26	Prov.NTB		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5	608.583.570	5	196.990.520	100.00	32.37	Prov.NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	125.118.500	1	30.509.450	100.00	24.38	Prov.NTB		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	118.123.170	1	49.089.570	100.00	41.56	Prov.NTB		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	130.477.330	1	40.547.630	100.00	31.08	Prov. NTB		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	118.123.170	1	42.330.170	100.00	35.84	Prov. NTB		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Memfasilitasi rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	116.741.400	1	34.513.700	100.00	29.56	Prov. NTB		
Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65	4.690.744.800	65	4.037.838.168	100.00	86.08	Prov.NTB		
Orientasi DPRD	Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	1.097.931.600	1	1.095.881.420	100.00	99.81	Prov.NTB		
Pendalaman Tugas DPRD	Workshop/Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65	987.799.500	65	978.962.798	100.00	99.11	Prov.NTB		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Menyediakan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	789.400.000	36	423.300.000	36.00	53.62	Prov.NTB	Adanya efisiensi kegiatan rapat pada masa transisi pergantian Anggota DPRD periode lama dengan Anggota DPRD terpilih.	

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Menyediakan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	454.760.200	9	439.111.700	100.00	96.56	Prov.NTB		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Memfasilitasi Kegiatan Hearing DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	25.500.000	1	17.450.000	100.00	68.43	Prov.NTB		
Penyusunan Program Kerja DPRD	Menyusun Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	14.298.500	0	-	-	-	Prov.NTB		
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Menyusun Laporan/Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	1.321.055.000	1	1.083.132.250	100.00	81.99	Prov.NTB		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	26.640.116.150	3	25.005.044.586	100.00	93.86	Prov.NTB		
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	8.753.600.000	1	7.397.851.048	100.00	84.51	Prov.NTB		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Menyusun Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2	64.555.000	2	43.715.000	100.00	67.72	Prov.NTB		
Pelaksanaan Reses	Memfasilitasi pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2	17.821.961.150	2	17.563.478.538	100.00	98.55	Prov.NTB		
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	-	0	-	-	-	Prov.NTB		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	2	68.953.800	2	31.176.200	100.00	45.21	Prov.NTB		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	39.861.400	1	22.450.000	100.00	56.32	Prov.NTB		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Menyusun dokumen pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	29.092.400	1	8.726.200	100.00	29.99	Prov.NTB		
Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	3	21.652.984.400	3	19.343.282.768	100.00	89.33	Prov.NTB		

NAMA PROGRAM PRIORITAS/ PROGRAM UNGGULAN PROVINSI	URAIAN KEGIATAN/ PEKERJAAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% REALISASI		LOKASI PROGRAM	PERMASALAHAN / KENDALA	KET
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	20.654.400.000	1	18.601.896.568	100.00	90.06	Prov.NTB		
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Menyusun laporan kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	0	-	0	-	-	-	Prov.NTB		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Memfasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	78.556.500	1	63.231.500	100.00	80.49	Prov.NTB		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Memfasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan serta Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	920.027.900	1	678.154.700	100.00	73.71	Prov.NTB		
				130.077.038.339		120.568.582.054					

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Lampiran Laporan 4.

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS DAK:

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU (DBHCHT)
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA OPD PELAKSANA: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN	SATUAN	TARGET KINERJA/ KELUARAN	ALOKASI PAGU	REALISASI		LOKASI PELAKSANAAN	KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
							KINERJA/ KELUARAN	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Lampiran Laporan 6.

**LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMA OPD PELAKSANA: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

[illegible]

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DANA DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA OPD PELAKSANA: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

NO	NAMA K/L PEMBERI DEKON/TP	DASAR PELAKSANAAN PELIMPAHAN/PENUGASAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN	SATUAN	TARGET KINERJA/ KELUARAN	ALOKASI PAGU	REALISASI		LOKASI PELAKSANAAN	KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
								KINERJA/ KELUARAN	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024